

**KEMAMPUAN ALOKASI BELANJA MODAL MEMODERASI
PENGARUH KINERJA KEUANGAN DAERAH PADA
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA**

Ni Ketut Sandri¹

I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri²

A.A.N.B. Dwirandra³

¹Program Pascasarjana Universitas Udayana, Bali, Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia

Email: tuadiaira@yahoo.com.

ABSTRAK

Keuangan Daerah (seperti : rasio pajak, pajak per kapita, upaya pajak, dan ruang pajak) diduga tidak selalu berpengaruh linier pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), melainkan karena adanya faktor kontinjensi yaitu salah satunya adalah alokasi belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti tentang kemampuan alokasi Belanja Modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Penelitian mencakup 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali dalam rentang waktu amatan 2008-2013, menggunakan sampel jenuh, dengan data sekunder yang diperoleh dari Biro Keuangan Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik. Teknik analisis data meliputi: uji asumsi klasik, *Moderated Regression Analysis*, uji koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alokasi Belanja Modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah (rasio pajak, upaya pajak, dan ruang pajak) pada IPM, namun Alokasi Belanja Modal tidak memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah (pajak per kapita) pada IPM. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah alokasi belanja modal menurunkan pengaruh kinerja keuangan daerah (rasio pajak) pada IPM. Alokasi belanja modal tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (pajak per kapita) pada IPM, Dan Alokasi belanja modal meningkatkan pengaruh kinerja keuangan daerah (upaya pajak, ruang pajak) pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kata Kunci :rasio pajak pajak per kapita, upaya pajak, ruang fiskal, Indeks Pembangunan Manusia

ABSTRACT

Regional financial performance, measured by the tax ratio, tax per capita, tax effort, and fiscal space, does not linearly influence the Human Development Index (HDI), but it depends on several contingency factors, one of which is the allocation of capital expenditure. The aim of this research is to understand the role of capital expenditure allocation as the moderator in the effect of regional financial performance on HDI of all districts and city in Bali Province. The context of this research includes eight districts and one city in Bali Province, and was observed during 2008-2013. The saturated sample is used, where the secondary data was obtained from the Bureau of Finance Bali Province and Bureau of Statistics Bali Province. The data was analyzed by several techniques, such as the assumption test, moderated regression analysis, coefficient determination test, F test and t test. The research found that the allocation of capital expenditure moderated the influence of regional financial performance, including the tax ratio, tax effort, and fiscal space, on the HDI. However, the allocation of capital expenditure failed to moderate the tax per capita (regional financial performance) on HDI. The research concludes that the allocation of capital expenditure will weaken the influence of the tax ratio on HDI, will not moderate the influence of tax per capita on HDI, and will enhance the influence of the tax effort and fiscal space on HDI of all districts and city in Bali Province.

Keywords: *tax ratio, tax per capita, tax effort, fiscal spaces, capital expenditure, human development index*

PENDAHULUAN

Pembangunan manusia senantiasa berada di baris terdepan dalam perencanaan pembangunan. Jadi hakekat pembangunan adalah usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat, sehingga dalam penyusunan anggaran alokasi belanja untuk keperluan pembangunan manusia perlu diprioritaskan (Fhino, 2009). Prioritas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukurnya.

Terkait dengan pembangunan, paradigma yang sedang berkembang saat ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan pembangunan manusia, dapat dilihat melalui tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap negara. Sejak tahun 1990 perkembangan tingkat kualitas hidup manusia (indeks HDI) di seluruh dunia diteliti dan laporannya diterbitkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP).

erdasarkan laporan tahunan UNDP pada tahun 2013 menginformasikan bahwa IPM Indonesia mengalami peningkatan. Kajian seksama masih perlu tetap dilakukan, mengingat IPM negara kita ternyata masih berada di bawah Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brunei Darussalam (UNDP, 2014).

Hal tersebut menunjukkan masih diperlukannya upaya keras untuk memperbaiki kualitas manusia Indonesia di tengah-tengah persaingan dengan masyarakat internasional. Upaya meningkatkan IPM Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya simultan untuk meningkatkan IPM kabupaten/kota seluruh Provinsi di Indonesia, salah satunya adalah IPM di semua kabupaten/kota provinsi

Bali. Perkembangan IPM Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2008 s.d 2013 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Perkembangan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013

No	Kab/Kota	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)					
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Jembrana	72.02	72.45	72.69	73.18	73.62	74.29
2	Tabanan	73.73	74.26	74.57	75.24	75.55	76.19
3	Badung	74.12	74.49	75.02	75.35	75.69	76.37
4	Gianyar	72.00	72.43	72.73	73.43	74.49	75.02
5	Klungkung	69.66	70.19	70.54	71.02	71.76	72.25
6	Bangli	69.72	70.21	70.71	71.42	71.8	72.28
7	Karangasem	65.46	66.06	66.42	67.07	67.83	68.47
8	Buleleng	69.67	70.26	70.69	71.12	71.93	72.54
9	Denpasar	77.18	77.56	77.94	78.31	78.8	79.41
	Bali	71.51	71.52	72.28	72.90	73.49	74.11

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2013 (data diolah)

yang menunjukkan bahwa IPM Provinsi Bali peningkatannya tidak konsisten. Pada tahun 2009 ke 2010 peningkatan IPM Provinsi Bali adalah sebesar 0,76, sedangkan pada tahun 2012 ke 2013 peningkatannya sebesar 0,62. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan yang dimiliki pemerintah Provinsi Bali belum optimal digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Peningkatan IPM, salah satunya ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah yaitu salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu komponen PAD Provinsi Bali adalah Pajak Daerah. Dari tahun 2012 s.d. 2014 Provinsi Bali mempunyai rasio pajak di atas rata-rata nasional. Bahkan pada tahun 2012 dan 2014 Provinsi Bali adalah sebagai Provinsi dengan rasio pajak dan rasio pajak per kapita tertinggi di Indonesia (Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan/DJPK, 2014). Ini dapat dimaknai bahwa semakin meningkatnya rasio-rasio tersebut berarti pemerintah kabupaten/kota memiliki dana yang cukup untuk mendukung berbagai upaya peningkatan IPM, namun kenyataannya alokasi dana untuk belanja publik relatif rendah sehingga menyebabkan pelayanan publik tidak memadai bagi masyarakat

Semenjak diterapkannya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengeksplorasi dan mengumpulkan PAD, sehingga dengan desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan IPM. Bentuk indikasi dari keberhasilan penerapan desentralisasi fiskal adalah pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini telah banyak dilakukan, namun hasilnya tidak konsisten. Diantaranya penelitian Gembira (2011) menunjukkan bahwa secara simultan variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (pajak dan bukan pajak) pengaruhnya positif pada IPM, hanya variabel Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap IPM secara parsial. Sedangkan variabel lain berupa variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (pajak dan bukan pajak) pengaruhnya tidak signifikan terhadap IPM. Artinya bahwa bila anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan bertambah akan meningkatkan IPM, *ceteris Paribus*. Di sisi lain Mirza, 2012 dalam penelitiannya menemukan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan pada IPM.

Sementara itu hasil penelitian yang kontradiktif ditemukan oleh Harahap (2010) yang menemukan bahwa secara parsial Dana Alokasi Umum/DAU dan

Dana Alokasi Khusus/DAK tidak berpengaruh terhadap IPM. Titin (2012) yang menyatakan bahwa belanja langsung tidak dapat memprediksi indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Sementara penelitian Setiawan dan Hakim (2013) menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto/PDB dan Pajak Pertambahan Nilai/PPN berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Estimasi model *Error Correction Model* (ECM), menemukan bahwa krisis ekonomi tahun 2008 berpengaruh terhadap IPM, sementara krisis tahun 1997 dan desentralisasi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, menyebabkan penelitian tentang IPM semakin menarik dan penting untuk dikaji, sehingga peneliti termotivasi untuk meneliti kembali, khususnya faktor-faktor yang diduga memiliki kontribusi terhadap peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Salah satunya adalah kinerja keuangan daerah yang meliputi: rasio pajak (*tax ratio*), pajak per kapita (*tax per capita*), upaya pajak (*tax effort*) dan ruang fiskal (*fiscal space*), serta adanya dugaan bahwa kinerja keuangan daerah tidak serta merta meningkatkan IPM, namun kemungkinan adanya pengaruh variabel alokasi belanja modal (ABM) yang memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah pada IPM.

Peranan ABM sangat penting dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Oleh karena itu, besarnya belanja modal suatu daerah diduga dapat memperkuat atau

memperlemah hubungan kinerja keuangan daerah yang meliputi rasio pajak, pajak per kapita, upaya pajak dan ruang fiskal pada IPM.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan penelitian ini adalah 1) Apakah alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (rasio pajak) pada IPM? 2) Apakah alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (pajak per kapita) pada IPM? 3) Apakah alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (upaya pajak) pada IPM? dan 4) Apakah alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (ruang fiskal) pada IPM?

Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kemampuan alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah dengan parameter rasio pajak, pajak per kapita, upaya pajak, dan ruang fiskal pada IPM.

Berdasarkan teori keagenan hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperluas kasanah teori keagenan, khususnya dalam menjelaskan konflik antara masyarakat dengan pemerintah mengenai kebijakan keuangan yang dapat memengaruhi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah sekaligus sebagai referensi untuk menentukan strategi yang tepat guna menggali pendapatan daerah dengan sumber daya yang dimiliki agar dapat meningkatkan alokasi belanja modal demi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Teori keagenan dijadikan acuan utama dalam penelitian ini untuk menjelaskan konflik yang terjadi antara pemerintah daerah (Pemda) dan

masyarakat yang diwakili oleh DPRD, berkaitan dengan kebijakan keuangan Daerah. Hal ini terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan kedua belah pihak yang terikat dalam suatu kontrak. Dalam kontrak tersebut pemerintah di samping ingin memuaskan prinsipal juga bertujuan untuk memaksimalkan kepentingannya.

Kaitan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara *principal* dan *agent*. Masyarakat yang diwakili oleh DPRD adalah *principal* dan pemerintah adalah *agent*. *Agent* diharapkan dalam mengambil kebijakan keuangan menguntungkan *principal*. *Principal* memiliki wewenang pengaturan kepada *agent*, dan memberikan sumberdaya kepada agen dalam bentuk pajak, retribusi, dana perimbangan, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pemda wajib menyampaikan laporan kinerja khususnya di bidang keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Bila keputusan agen merugikan bagi *principal* maka akan timbul masalah keagenan. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (*assymetric information*) maka *principal* membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh *agent* adalah benar.

Kinerja adalah capaian/realisasi atas apa yang telah direncanakan. Kinerja seseorang atau organisasi dikatakan baik apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target yang direncanakan. Kinerja dikatakan sangat baik apabila pencapaian

melebihi target, sedangkan maka dapat dikatakan kinerja dikatakan buruk apabila capaian lebih rendah dari target (Sularso dan Restianto, 2011).

Halim, (2007) membagi belanja modal menjadi 2 (dua) bagian : 1) Belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum. Contoh belanja publik: pembangunan jembatan dan jalan raya, pembelian alat transportasi massa, dan pembelian mobil ambulans. 2) Belanja aparatur, yaitu belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, seperti pembelian kendaraan dinas, pembangunan gedung pemerintahan dan pembangunan rumah dinas.

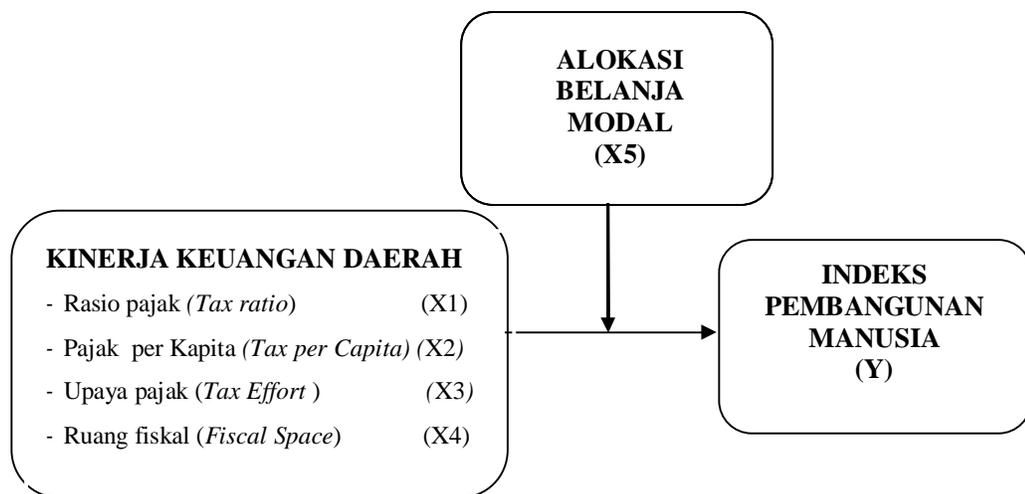
Belanja modal adalah belanja yang outputnya bersifat menambah aset tetap/inventaris yang bermanfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk juga biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Tingkat investasi modal yang semakin tinggi diharapkan mampu meningkatkan pelayanan publik, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan IPM.

Pendekatan kontijensi akan digunakan dalam penelitian ini, untuk mengevaluasi keefektifan hubungan antara kinerja fiskal daerah dengan IPM. Berdasarkan pendekatan di atas ada dugaan alokasi belanja modal akan memoderasi pengaruh antara kinerja fiskal daerah pada IPM.

IPM sebagai suatu standar dalam pengukuran pembangunan manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB. IPM merupakan indeks

komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), indeks harapan hidup, dan indeks standar hidup layak. IPM digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan di suatu tempat pada suatu waktu. Selain itu, IPM juga sebagai alat pemantau yang bisa memberikan perbandingan antar wilayah serta perkembangan antar waktu sehingga dapat memperlihatkan dampak pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya (BPS, 2009:3)

Konsep penelitian disajikan pada gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1 Konsep Penelitian

Kuncoro (2004) dalam penelitiannya menemukan bahwa pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi

pemerintah yang meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sarana penunjang lainnya.

Bhakti dan Hakim (2013), dalam penelitiannya menemukan bahwa PDB dan PPN berpengaruh terhadap IPM dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Estimasi model ECM menemukan bahwa krisis ekonomi tahun 2008 berpengaruh terhadap IPM, sementara krisis tahun 1997 dan desentralisasi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap IPM.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁ : Alokasi belanja modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah berupa rasio pajak pada IPM.

Kontribusi setiap penduduk terhadap pajak daerah ditunjukkan pada pajak per kapita. Semakin tinggi pajak per kapita akan dapat meningkatkan PAD, jadi semakin tinggi juga dana yang tersedia untuk dialokasikan (salah satunya alokasi ke belanja modal) sehingga semakin tinggi stimulus peningkatan IPM.

Sumardjoko (2013), hasil penelitiannya membuktikan bahwa dana otonomi khusus dan belanja modal pada indeks pembangunan manusia pengaruhnya signifikan, baik pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap indeks pembangunan manusia melalui intervening belanja modal pada tahun 2002-2012. Penelitian ini menunjukkan bahwa antara dana otonomi khusus terhadap indeks pembangunan manusia daerah Papua dan Papua Barat, dan belanja modal berperan sebagai variabel intervening.

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂ : Alokasi belanja modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah berupa rasio pajak Per Kapita pada indeks pembangunan manusia.

Mulyanto (2007) menyatakan bahwa upaya fiskal atau *tax effort* adalah jumlah spajak yang sungguh-sungguh dikumpulkan oleh kantor pajak dan dilawankan dengan potensi pajak (*tax capacity potensial*). Usaha pajak dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan membayar masyarakat adalah produk domestik regional bruto (PDRB). Jika PDRB suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah dalam membayar (*ability to pay*) pajak juga akan meningkatkan dana yang berhasil di pupuk untuk mendanai belanja daerah.

Martini dan Dwirandra 2015, dalam penelitiannya menyatakan bahwa rasio ketergantungan pengaruhnya negatif dan signifikan pada ABM, rasio efektivitas PAD pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA pengaruhnya negatif dan signifikan pada ABM, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas disusun hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Alokasi belanja modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah berupa upaya pajak pada IPM

Memperbesar ruang fiskal daerah untuk belanja modal sangat penting karena dapat menjadi stimulus perekonomian daerah. Selain itu, anggaran yang digunakan secara efektifitas dan efisiensi di daerah akan dapat mendukung terciptanya ruang fiskal (DJPK, 2014), dan pada akhirnya dapat meningkatkan IPM.

Holtz-Eakin (1985) dalam Darwanto (2007) menyatakan bahwa keterkaitan antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah sangat erat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan gambaran hasil penelitian sebelumnya tersebut maka peneliti menyusun hipotesis untuk pengembangan penelitian sebagai berikut ini.

H₄ : Alokasi belanja modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah berupa ruang fiskal pada IPM.

METODA PENELITIAN

Penelitian dilakukan di sembilan kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota dengan data panel dari periode 2008 hingga 2013. Data berjumlah 54 amatan (terdiri dari 9 kabupaten/kota x 6 tahun), dengan sampel jenuh. Menggunakan sumber data sekunder yaitu dari laporan realisasi APBD dan IPM tahun 2008-2013) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali.

Variabelnya diidentifikasi sebagai berikut :

- 1) Variabel terikat/bebas dalam penelitian ini adalah IPM (Y).
- 2) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan (X) berupa: *Tax Ratio* (X1), *Ratio Per Capita* (X2), *Tax Effort* (X3), dan *Fiscal Space* (X4)

3) Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah alokasi belanja modal (X5).

Solimun, (2010) mengklasifikasikan variabel moderasi menjadi 4 (empat) jenis yaitu *pure moderasi* (moderasi murni), *quasi moderasi* (moderasi semu), *homologiser moderasi* (moderasi potensial) dan *Predictor moderasi* (moderasi sebagai predictor). Masing-masing klasifikasi moderasi dapat diidentifikasi sebagaimana contoh berikut, jika X adalah variabel predictor, Y variabel tergantung dan M variabel moderasi maka persamaan regresi yang dapat dibentuk sebagai berikut :

1) Tanpa melibatkan variabel moderasi $\hat{Y}_1 = b_0 + b_1X_1 \dots\dots\dots (1)$

2) Melibatkan variabel moderasi $\hat{Y}_1 = b_0 + b_1X_1 + b_2M_1 \dots\dots\dots (2)$

3) Melibatkan variabel moderasi dan

Interaksi $\hat{Y}_1 = b_0 + b_1X_1 + b_2M_1 + b_3X_1 * M_1 \dots\dots\dots (3)$

Secara singkat, 4 jenis klasifikasi variabel moderasi dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2
Klasifikasi Variabel Moderasi

No.	Tipe Moderasi	Koefesien
1	Moderasi murni (<i>Pure Moderasi</i>)	b2 <i>non significant</i> b3 <i>significant</i>
2	Moderasi semu (<i>Quasi Moderator</i>)	b2 <i>significant</i> b3 <i>significant</i>
3	Moderasi potensial (<i>Homologiser Moderasi</i>)	b2 <i>non significant</i> b3 <i>non significant</i>
4	Moderasi sebagai predictor (<i>Predictor Moderasi</i>)	b2 <i>significant</i> b3 <i>non significant</i>

Sumber : Solimun (2010)

Definisi operasional variabel :

1) Belanja Modal

Belanja modal adalah jumlah realisasi seluruh belanja pembangunan seperti infrastruktur, investasi baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja modal meliputi belanja tanah, gedung dan bangunan, belanja peralatan dan mesin, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. Belanja modal yang dimaksud adalah belanja modal pada t_0 karena dampak realisasi belanja modal pada tahun berjalan baru dirasakan di tahun berikutnya.

2) Kinerja keuangan:

- (1) Rasio Pajak (*tax ratio*): rasio pajak daerah merupakan jumlah penerimaan pajak daerah diperbandingkan dengan PDRB.
- (2) *Tax per Capita* adalah jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dibandingkan dengan jumlah penduduk, (rasio pajak x PDRB per kapita),
- (3) *Tax effort* dapat diartikan sebagai rasio antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kemampuan masyarakat membayar pajak adalah produk domestik regional bruto.
- (4) *fiscal space* : jumlah Pendapatan Daerah dikurangkan dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya, belanja pegawai dan belanja bunga, kemudian dibagi dengan jumlah pendapatannya (DJPK, 2013).

3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM): merupakan indeks gabungan dari tiga indeks, yaitu :

(1) Indeks harapan hidup, dimensinya umur panjang dan sehat (*longevity*)

(2) Indeks pendidikan, dimensinya pengetahuan (*knowledge*)

(3) Indeks standar hidup layak, dimensinya hidup layak (*decent living*)

Teknik analisis data menggunakan *Moderated Regression Analysis* (MRA), namun sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik (uji normalitas residual, uji autokorelasi, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas), perumusan model MRA, koefisien determinasi, uji kelayakan model dengan uji f, uji t dan uji hipotesis.

Model persamaan regresi yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_1.X_5 + b_7X_2.X_5 + b_8X_3.X_5 + b_9X_4.X_5 + e \dots (3)$$

Keterangan:

- Y = Variabel Indeks Pembangunan Manusia
 X₁ = Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa *tax ratio*
 X₂ = Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio *tax per capita*
 X₃ = Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio *tax effort*
 X₄ = Variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio *fiscal space*
 X₅ = Variabel Alokasi Belanja Modal
 X₁.X₅ = Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa *tax ratio* dengan Alokasi Belanja Modal
 X₂.X₅ = Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa Rasio *tax per capita* dengan Alokasi Belanja Modal
 X₃.X₅ = Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa *tax effort* dengan Alokasi Belanja Modal
 X₄.X₅ = Interaksi antara variabel Kinerja Keuangan Daerah berupa *fiscal space* dengan Alokasi Belanja Modal
 α = Konstanta
 b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)
 e = Nilai residu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi klasik (uji normalitas residual, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas) hasilnya dapat dilihat pada lampiran 1. Berdasarkan hasil uji normalitas residual terhadap 54 amatan, menunjukkan hasil nilai *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) = 1.334 dan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,057. Ini berarti secara statistik nilai Sig. (2-tailed) > 0,05, jadi data terdistribusi secara normal.

Sedangkan uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson (DW) = 2,212. Nilai dU = 1,7684, dL 1,3669. DW = 2,212 berada diantara dU (1,7684) dan 4-dU (4-1,7684), jadi hasil uji autokorelasinya : $dU < DW < 4-dU$ yaitu $1,7684 < 2,212 < 4-1,7684$. Ini berarti d-hitung berada pada daerah bebas autokorelasi.

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas menunjukkan bahwa Rasio Pajak nilai *tolerance* adalah 0,402 (> 0,1) dan nilai VIF = 2,486 (< 10). Rasio Pajak Per Kapita, nilai *tolerance*-nya = 0,207 (> 0,1) dan nilai VIF = 4,833 (< 10). Untuk Upaya pajak, nilai *tolerance*-nya = 0,238 (> 0,1) dan nilai VIF = 4,207 (< 10). Untuk Ruang Fiskal, nilai *tolerance*-nya = 0,229 (> 0,1) dan nilai VIF = 4,369 (< 10). Untuk variabel BM, nilai *tolerance*-nya = 0,681 (> 0,1) dan nilai VIF = 1,469 (< 10). Hasil ini membuktikan bahwa nilai *tolerance* untuk seluruh variabel > 10%, VIF semua variabel < 10%, artinya data dalam penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Berdasarkan uji *Glejser asym sig.* dari masing-masing variabel menunjukkan hasil di atas 0,05. Hal ini berarti seluruh variabel tersebut dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas. Sedangkan uji F dapat diketahui *p-value* 0,00, < $\alpha = 0,05$

menunjukkan model penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis menguji pengaruh variabel independen dan moderasi pada variabel dependen. Hal ini artinya variabel kinerja keuangan daerah (seperti rasio pajak, pajak per kapita, upaya pajak, dan ruang fiskal) yang dimoderating alokasi belanja modal berpengaruh terhadap variabel dependennya yaitu IPM.

Berdasarkan hasil uji kelayakan model (uji F), $p\text{-value} = 0,000 < \alpha = 0,05$ membuktikan model penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh variabel independen dan moderasi pada variabel dependen. Berdasarkan analisis koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai $R^2 = 0,594$, yang berarti 59,4% variasi perubahan IPM dapat dijelaskan oleh variabel kinerja keuangan daerah yang dimoderating ABM. 40,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar satu variabel bebas dan variabel moderasi secara *partial* dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Uji statistik t dilakukan dengan membandingkan hasil nilai signifikansi dengan $\alpha = 0,05$.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji interaksi *Moderated Regression Analysis* (MRA), hasilnya disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil uji Moderated Regression Analysis

Variabel	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	70,2703456012	4,3127834206	-	16,294	0,000
TR (X ₁)	1,815689323424	1,09822806735	1,048	1,653	0,165
TPC (X ₂)	0,00000015586	0,00000219954	0,083	0,071	0,944
TE (X ₃)	-3,5118808794	1,1778917490	-2,501	-2,981	0,005
FS (X ₄)	0,000000000058	0,000000000023	-2,099	2,557	0,014
BM (X ₅)	-0,00000017020	0,00000039306	-0,193	-0,433	0,667
TRBM (X ₁ .X ₅)	-0,00000033364	0,00000013493	-2,454	-2,473	0,017
TPCBM (X ₂ .X ₅)	0,000000000000	0,000000000000	0,864	0,668	0,508
TEBM (X ₃ .X ₅)	0,00000038964	0,00000012718	4,252	3,064	0,004
FSBM (X ₄ .X ₅)	0,000000000000	0,000000000000	-2,987	-2,182	0,034
R²					0,594
F Hitung					7,164
Sig. F					0,000

Sumber: Hasil olah data dengan SPSS

Persamaan regresi yang dihasilkan melalui *Moderated Regression Analysis*

(MRA) adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Y = & 70,2703456012 + 1,815689323424 X_1 + 0,00000015586 X_2 - \\
 & 3,5118808794 X_3 + 0,000000000058 X_4 - 0,00000017020 X_5 - \\
 & 0,00000033364 X_1 X_5 + 0,000000000000 X_2 X_5 + 0,00000038964 X_3 X_5 \\
 & + 0,000000000000 X_4 X_5 + e \dots \dots \dots (12)
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- TR = *Tax Ratio*
- TPC = *Tax Per Capita*
- TE = *Tax Effort*
- FS = *Fiscal Space*
- BM = Belanja Modal
- TRBM = Interaksi Rasio Pajak dengan Belanja Modal
- TPCBM = Interaksi Pajak Per Kapita dengan Belanja Modal
- TEBM = Interaksi Upaya Pajak dengan Belanja Modal
- FSBM = Interaksi Ruang Fiskal dengan Belanja Modal
- e = Nilai Residu

Berdasarkan persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa:

- 1) Nilai konstanta 70,2703456012 memiliki arti apabila rasio pajak, pajak per kapita, upaya pajak ruang fiskal dan belanja modal besarnya 0 satuan, maka besaran IPM adalah 70,2703456012 satuan.
- 2) Nilai koefisien regresi rasio pajak sebesar 1,815689323424 memiliki arti apabila rasio pajak bertambah sebesar satu satuan, maka IPM meningkat sebesar 1,815689323424 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- 3) Nilai koefisien regresi rasio pajak per kapita sebesar 0,000000015586 memiliki arti apabila rasio pajak per kapita bertambah sebesar satu satuan, maka IPM naik sebesar 0,000000015586 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- 4) Nilai koefisien regresi upaya pajak sebesar - 3,5118808794 memiliki arti apabila upaya pajak meningkat sebesar satusatuan, maka mengakibatkan penurunan IPM sebesar 3,5118808794 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- 5) Nilai koefisien regresiruang pajak sebesar 0,000000000058 memiliki arti bahwa apabila ruang pajak bertambah sebesar satu satuan, maka IPM meningkat sebesar 0,000000000058 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- 6) Nilai koefisien regresi BM sebesar -0,000000017020 memiliki arti bahwa apabila BM meningkat sebesar satu satuan, maka mengakibatkan penurunan

IPM sebesar 0,000000017020 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).

- 7) Nilai koefisien moderat rasio pajak BM ($X_1.X_5$) sebesar $-0,000000033364$ mengindikasikan bahwa setiap interaksi rasio pajak dengan belanja modal meningkat satu satuan akan menurunkan IPM sebesar $0,000000033364$ satuandengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- 8) Nilai koefisien moderat rasio pajak per kapita BM ($X_2.X_5$) sebesar $0,000000000000$ mengindikasikan bahwa setiap interaksi rasio pajak per kapita dengan belanja modal bertambah satu satuan maka IPM meningkat sebesar $0,000000000000$ satuandengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- 9) Nilai koefisien moderat upaya pajak BM ($X_3.X_5$) sebesar $0,000000038964$ mengindikasikan bahwa setiap interaksi upaya pajak BM dengan belanja modal bertambah satu satuan maka IPM meningkat sebesar $0,000000038964$ satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).
- 10) Nilai koefisien moderat ruang pajak ABM ($X_4.X_5$) sebesar $0,000000000000$ mengindikasikan bahwa setiap interaksi ruang pajak dengan belanja modal bertambah satu satuan maka IPM meningkat sebesar $0,000000000000$ satuandengan asumsi variabel lainnya konstan (*ceteris paribus*).

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kemampuan belanja modal dalam memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa rasio pajak pada

IPM. Nilai signifikansi (Sig.t) koefisien interaksi TR dengan BM =0,017 < α = 0,05 artinya belanja modal memoderasi pengaruh rasio pajak pada IPM, sehingga H_1 diterima.

Semakin meningkat belanja modal, maka semakin menurun pengaruh rasio pajak pada IPM. Hal ini sangat wajar karena semakin besar pendapatan pajak yang dialokasikan pada belanja modal akan meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik untuk menunjang peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat yang ketiganya merupakan faktor pembentuk IPM.

Koefisien TR (X1) pada penelitian ini menunjukkan nilai koefisien yang tidak signifikan, sedangkan koefisien interaksi moderasi TR dan BM (X1.X5) signifikan. Hal ini berarti bahwa belanja modal merupakan variabel moderasi murni (*pure moderation*).

Hasil ini konsisten dengan penelitian Christy (2009), Setyowati dan Suparwati (2012), yang menemukan bahwa DAU, PAD, dan DAK berpengaruh positif pada Indeks Pembangunan Manusia melalui alokasi belanja modal. Sesuai juga dengan penelitian Sumardjoko (2013) yang membuktikan bahwa dana otonomi khusus berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal APBD Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat periode tahun 2002-2012.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa Alokasi belanja modal memoderasi pengaruh Kinerja Keuangan Daerah berupa pajak per kapita pada IPM. Berdasarkan hasil pengujian MRA, dapat diketahui bahwa alokasi belanja modal tidak mampu memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa pajak per

kapita pada IPM. Hal ini diduga disebabkan karena pendapatan pajak yang dialokasikan pada belanja modal dalam rangka menunjang program peningkatan kuantitas dan kualitas pendidikan, serta kesehatan masyarakat jumlahnya belum cukup untuk memenuhi besarnya jumlah penduduk yang membutuhkan layanan pendidikan dan kesehatan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa nilai koefisien TPC (X2) tidak signifikan, sedangkan koefisien interaksi moderasi TPC dan BM (X2.X5) juga tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa belanja modal merupakan variabel moderasi potensial (*homologiser moderation*).

Lilis (2012) dan Vegirawati (2012) juga sejalan dengan hasil temuan dari penelitian ini yaitu pembangunan Indonesia yang pendanaannya bersumber dari pendapatan pajak per kapita dan belanja langsung kurang mendukung pengembangan sumber daya manusia secara optimal.

Kondisi ini juga diduga disebabkan karena belanja modal tidak selalu menghasilkan *output* yang berhubungan langsung dengan fungsi pelayanan publik, sehingga alokasi belanja modal tidak dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Kurang maksimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset tetap yang dihasilkan dari alokasi belanja modal yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik atau digunakan oleh masyarakat, sehingga banyak proyek investasi publik yang tidak tepat sasaran, juga tentunya tidak akan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Selain itu Eisenhardt (1989) mengsumsikan tiga sifat dasar manusia, salah satunya adalah pada umumnya manusia mementingkan diri sendiri, pemerintah

akan lebih mementingkan kepentingan aparatur atau dirinya sendiri daripada mementingkan kepentingan masyarakat, yaitu lebih memprioritaskan belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan pegawai daripada belanja modal yang digunakan untuk fasilitas umum masyarakat..

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa kemampuan belanja modal dalam memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa upaya pajak pada IPM. Hasil pengujian MRA menunjukkan bahwa nilai signifikansi (Sig.t) koefisiennya $0,004 < \alpha = 0,05$ artinya belanja modal memoderasi pengaruh upaya pajak pada IPM, sehingga H_3 diterima.

Berdasarkan hasil uji MRA juga dapat diketahui nilai koefisien TE (X3) menunjukkan hasil yang signifikan, sedangkan koefisien interaksi moderasi TE dan BM (X3.X5) juga hasilnya signifikan. Ini artinya ABM merupakan moderasi semu (*quasi moderator*).

Hal ini berarti sudah adanya terobosan Pemda untuk memanfaatkan *fiscal space* yang ada, *fiscal space* mampu berperan mendorong pembangunan dan penyediaan infrastruktur daerah Propinsi Bali sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan peningkatan IPM.

Hipotesis keempat yang menyatakan bahwa kemampuan belanja modal dalam memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah berupa ruang fiskal pada IPM. Hasil pengujian menunjukkan koefisien nilai signifikansi (Sig.t) $0,034 < \alpha = 0,05$ artinya belanja modal mampu memoderasi pengaruh ruang fiskal terhadap IPM, jadi H_4 diterima. Belanja modal memperkuat pengaruh ruang fiskal pada IPM.

Penelitian ini hasilnya juga menunjukkan bahwa FC (X4) nilai koefisiennya signifikan sedangkan koefisien interaksi moderasi FC dan BM (X4.X5) juga signifikan. Hal ini berarti bahwa belanja modal merupakan variabel moderasi semu (*quasi moderator*).

Temuan penelitian ini sesuai dengan Alexiou (2009) dan Rahayu (2004) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk investasi publik menghasilkan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa alokasi belanja modal memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (rasio pajak) pada IPM. dalam hal ini Belanja Modal merupakan variabel moderasi murni (*pure moderation*). Alokasi belanja modal tidak memoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah (pajak per kapita) pada IPM, dan Belanja Modal merupakan variabel moderasi potensial (*homologiser moderation*). Serta Alokasi belanja modal meningkatkan pengaruh kinerja keuangan daerah (upaya pajak, ruang pajak) pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Belanja Modal merupakan variabel moderasi semu (*quasi moderator*).

Saran penulis adalah : Pemda diharapkan mampu lebih mengeksplorasi dan memanfaatkan potensi-potensi dan sektor-sektor ekonomi daerah yang dapat menambah sumber pendapatan pajak sehingga dapat mendanai seluruh aktivitas pemda secara mandiri dan tidak selalu tergantung terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dapat memanfaatkan dana yang bersumber dari pajak per

kapita untuk pengembangan sumber daya manusia secara lebih optimal, membangun infrastruktur publik dan sarana penunjang lainnya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat.

Studi kelayakan dan analisis investasi publik selalu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum dibangunnya sarana dan prasarana publik, agar proyek tersebut dapat dimanfaatkan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Petugas yang ditugaskan mengelola operasional dari sarana dan prasarana yang dibangun harus selalu diperhatikan, agar dapat tercapainya tujuan pembangunan fasilitas publik tersebut.

Berdasarkan hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) menunjukkan bahwa nilai koefisien β dari interaksi antara variabel independen dengan variabel pemoderasi sangat kecil. Hal ini memberi peluang bagi peneliti selanjutnya untuk menggali kemungkinan variabel lain seperti variabel non keuangan, sebagai variabel independen dan pemoderasi pengaruh kinerja keuangan daerah pada IPM yang belum dapat dikembangkan pada penelitian ini, karena keterbatasan data yang tersedia, serta menggunakan data yang terbaru yaitu tahun 2014.

REFERENSI

- Alexiou, Constantinos. 2009. Government Spending and Economic Growth: Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE). *Journal of Economic and Social Research*. 11(1) : 1-16.
- Anonim. 2012. *Deskripsi dan Analisis APBD 2012*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. 2013. *Deskripsi dan Analisis APBD 2013*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk)–Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. 2014. *Deskripsi dan Analisis APBD 2014*. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) –Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia 2007-2008*, Jakarta:Indonesia.
- _____. 2012. *Data Sosial Kependudukan Provinsi NTT*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bhakti, M. Setiawan dan Hakim, A. 2013. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. *Jurnal Economia*, Vol. 9 (1). 2013
- Budiriyanto, E. 2011. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Dalam Formulasi DAU*. Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu RI.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. *The 3rd National Conference UKWMS Surabaya*, October 10th 2009
- Darwanto dan Y. Y. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol 08:24-31.

- Denni S.M. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, *Economics Development Analysis Journal EDAJ*. 1(1) (2012)
- Eisenhardt K.1989. Building Theories from Case Study Research, *Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 4, 532-550.
- Fahri E.O. dan Winston P. (2013). Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah, *Jurnal Accountability*, Vol 02:1-2013
- Fhino A. C. dan Priyo H. A. 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal Dan Kualitas Pembangunan Manusia. *Naskah lengkap The 3rd National Conference UKWMS*” Surabaya, October 10th 2009.
- Gembira, M. (2011) “Pengaruh Kapasitas Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Pemerintahan Kota/Kabupaten Di Sumatera Utara” (*Tesis*). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2006. *Statistik Multivariat SPSS*. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.:Mankiw,Gregory:<http://gregmankiw.blogspot.com/2010/03/taxes-per-person.html>.
- . 2011. *Statistik Multivariat SPSS*. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.:Mankiw.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ke-3. Jakarta: Salemba Empat.
- . 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hanafi, I. dan Nugroho, T. 2009. *Kebijakan Keuangan Daerah: Reformasi dan Model Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Harahap, Riva Ubar. 2010.”Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara” (*Tesis*). Medan: Universitas Sumatera Utara.

- Harianto dan Adi P.H. 2006. Hubungan antara DAU, Belanja Modal, PAD, dan Pendapatan Perkapita. *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang.
- Hasan, T.I.B. 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINS Riset*, 1(1).
- Hendarmin, 2012. Pengaruh Belanja Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat, *Jurnal EKSOS, Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi UNTAN*, Volume 8, Nomor 3, Oktober 2012, 144–155
- Hidayat, F. M. dan Ghozali, M. 2013. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah*, Malang :Universitas Brawijaya.
- Husnatarina, F dan Nor, W. 2007. Pengaruh keterlibatan Pekerjaan dan Budget Impphasis dalam Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. *The 1st Accounting Conference Faculty of Economic Universitas Indonesia*, Depok:1-25. 7-9 November.
- Ismerdekaningsih, Herlina. dan Rahayu, E. S. 2002. Analisis Hubungan Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruto di Indonesia (Studi Tahun 1985-2000). ITB Central Library.
- Jensen, M. dan Meckling, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4): 305-360.
- Khusaini, M. 2006. Ekonomi Publik: *Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFU Unibraw.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Lilis, S. dan Yohana, K.S. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi DAU, DAK, PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Prestasi*, Vol 9 (1), 2012.

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Andi.
- Martini dan Dwirandra, 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10.2 (2015):426-443.
- Mirza Denni S. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Jawa Tengah Tahun 2006-2009, *Economics Development Analysis Journal EDAJ*. 1(1) (2012)
- Munawer S. dan Khwaja I. Iyer. 2014. Revenue Potential, Tax Space, and Tax Gap A Comparative Analysis, *Policy Research Working Paper*.
- Nana dan Dwirandra. 2013. Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Pada Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Dan Kemiskinan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6.3 (2014):481-497.
- Nur, B. 2013. Pengaruh Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011, *Economic Development Analysis Journal Fakultas Ekonomi Universitas Semarang*, Vol. 2 No. 3 (2013).
- Rahayu Tri. 2004. Peranan Sektor Publik Lokal Dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta. *Jurnal Kinerja* Vol. VIII :133-147.
- Solimun, 2010. *Pemodelan Persamaan Struktural Pendekatan PLS*, Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, Malang.
- Sudarwanto A. 2013. Analisis APBD Tahun 2012. *Jurnal STIE Semarang*, Vol 5: No 1, Edisi Februari 2013 (ISSN : 2252-7826)
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi ke-15. Bandung Alfabet.
- Suhardjanto, D., Ani Jufriyah Sulistyorini dan Sri Hartoko. 2009. The Influence of Fiscal Decentralization On The Public Expenditure in Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 13(3):233-252.

- Sularso, H., Restianto, Y.E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi*, Vol.1 No.2:109-124.
- Sumardjoko I. (2013). “Pengaruh Penerimaan Dana Otonomi Khusus Terhadap Indek Pembangunan Manusia Papua Dan Papua Barat Dengan Belanja Modal Sebagai Intervening” (*Tesis*): Universitas Airlangga
- Suryarini, T. (2012). Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah Bukti Empiris atas Aplikasi Agency Theory di Sektor Publik. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, Vol.2 No. 1 : 207-216. ISSN: 2088-0685
- Swandewi (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Keserasian Anggaran Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 3.7 (2014) :356-376.
- Titin, V. 2012. Pengaruh Alokasi Belanja Langsung Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia di Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)* Vol 2:65-74.
- UNDP. 2014. *Human Development Report*. Oxford University Press. New York
- . 2013. *Human Development Report 2013*. Oxford University Press. New York.